

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kesejahteraan petani (Nyamweru et al., 2023). Upaya peningkatan produksi pertanian memerlukan inovasi teknologi, pengelolaan kebijakan teknis, kemitraan terkait modal usahatani, pembinaan dan pendampingan petani (Mardikanto, 2009). Inovasi teknologi haruslah dapat diakses oleh petani melalui sistem penyuluhan. Dalam system penyuluhan terdapat sejumlah pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang satu sama lain memerlukan suatu kerangka kerja kolaboratif agar penyuluhan itu dapat terselenggara dengan baik. Kerangka kolaboratif tersebut berupa keterkaitan industri dan akademisi yang dikenal dengan *Triple Helix* (Etzkowitz, 2008).

Konsep *Triple Helix* dikembangkan pertama kali oleh Leydesdorf (1995) sebagai kerangka normatif (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), dalam memahami interaksi antara aktor kunci dalam bidang pertanian khususnya penyuluhan. *Triple Helix* (TH) dikembangkan lagi menjadi *pentahelix* dengan penambahan unsur masyarakat sipil sebagai penggerak perubahan dan peran media sebagai sarana komunikasi publik mengenai pembangunan pertanian yang berkontribusi terhadap kemajuan sosio-ekonomi di suatu wilayah (Sumartono & Hermawan, 2020). Dalam model *pentahelix*, pengelolaan informasi menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai pihak yang berbeda serta belum mampu diaplikasikan oleh pelaku utama (Heryadi et al., 2022). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kolaborasi TH yang berpeluang mempercepat transformasi sektor pertanian melalui penyuluhan secara lebih efektif dan inovatif.

Dalam konsep TH, komponen pemerintah mencakup Dinas Pertanian Provinsi/Kota/Kabupaten sebagai satuan kerja organisasi penyuluhan dan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan berfungsi menjembatani interaksi antar aktor dalam hubungan kontraktual program pertanian, dukungan regulasi serta pelatihan teknis. Komponen akademisi berasal dari Universitas/Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian yang berfungsi sebagai sumber pengetahuan/informasi dan teknologi (Zhou & Etzkowitz, 2021), yang akan ditransfer kepada petani melalui penyuluh pertanian. Komponen Industri mencakup pelaku usaha yang

terlibat langsung dalam penyuluhan meliputi distributor, pengecer pupuk pengelola jasa dan saprodi serta kelompok tani. Mereka berkolaborasi dengan pemerintah dan akademisi guna membantu petani mengembangkan kegiatan usahatani, pemasaran dan dalam mengakses pasar yang lebih luas.

Penelitian terkait TH dalam pembangunan pertanian telah banyak dilakukan di dunia seperti Eropa, Jerman, Asia bahkan Indonesia. Penelitian terkait Model Triple Helix dalam menganalisis rantai pasokan buah dan sayuran dengan manajemen yang melibatkan petani telah dilakukan oleh Perdana & Kusnandar, (2012). Selain itu telah pula diteliti peranan ketiga elemen TH dalam penyusunan regulasi terkait adaptasi iklim oleh Emeis & Fallmann (2022); Adaptasi metode untuk isu-isu terkini dalam inovasi teknologi mitigasi perubahan iklim dan pertanian keberlanjutan di Jerman dilakukan oleh Cai & Etzkowitz (2020); Sistem inovasi pertanian di dua negara Asia Timur yaitu Korea dan Tiongkok oleh Kim et al., (2012); Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kompetensi oleh Nayati & Ruhana (2019). Penelitian-penelitian tersebut telah menjelaskan peranan masing-masing aktor dalam kegiatan pertanian namun belum menyentuh kinerja penyuluhan sebagai agent pendampingan petani di tingkat lapangan.

Telah diakui bahwa TH berperan dalam mendukung kinerja penyuluh pertanian dalam mengembangkan pengetahuan dan kapasitas petani, dan membantu meningkatkan adopsi teknologi, praktik usaha tani yang lebih baik. Kinerja penyuluhan yang baik dapat tercermin dari kemampuan memfasilitasi petani dalam meningkatkan kemampuan dan sikap kemandiriannya dalam mengadopsi teknologi produksi dan pemasaran demi peningkatan pendapatan (Mardikanto, 2009).

Tidak terkoneksi ketiga entitas menyebabkan penyuluhan bekerja secara normatif hanya menyelesaikan tugas secara administratif tanpa kontribusi entitas akademisi dan pelaku usaha sehingga tidak tersampainya informasi teknologi baru maupun jejaring kemitraan yang dibutuhkan oleh petani. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola multi aktor yang berperan dalam produksi pangan (Azhar et al., 2023).

Pemangku kepentingan yang didefinisikan sebagai sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu mencakup aktor kunci, primer dan sekunder (Manghayu et al., 2018; Reed et al., 2009). Secara garis besar ada tiga hal yang menjadi indikator dalam menganalisis peran aktor dalam pembangunan yaitu: keterlibatan aktor,

kepentingan dan pengaruh, serta hubungan dan peranan melalui peringkat pemangku kepentingan dalam urutan kepentingan yang berdasarkan power (Ackermann & Eden, 2011).

Keterlibatan aktor dalam penyuluhan pertanian mengupayakan petani agar dapat beradaptasi terhadap perubahan teknologi melalui integrasi umpan balik informasi dan pemanfaatan sumber daya. Tujuan penyuluhan pertanian dalam pembangunan yaitu memberdayakan masyarakat petani dalam mengembangkan usaha pertaniannya (Bahua, 2015). Pemberdayaan petani merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan petani melalui pemanfaatan sumber daya serta potensi yang mereka miliki (Saputra & Ulum, 2022). Unsur kinerja penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan pertanian meliputi: aksesibilitas informasi teknologi, keterlibatan/partisipasi pelaku utama dalam pembangunan, akuntabilitas dan kapasitas organisasi serta pengembangan potensi sumber daya bagi usaha tani di wilayah (Bahua, 2015; Mardikanto, 2009; Pratama et al., 2018).

Nusa Tenggara Barat (NTB) terkenal dengan sebutan Bumi Gora dimana pertanian masih menjadi leading sektor pembangunan yang menyumbang lebih dari seperlima produk domestik regional bruto (PDRB). Berdasarkan data BPS (2023), sumbangan sektor pertanian sebesar 22,8% merupakan yang terbesar dibandingkan sektor lain di NTB. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 – 2023 yaitu Membangun Nusa Tenggara Barat yang adil sejahtera dan mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Hal ini juga tertuang di RPJMD NTB 2019-2023 terkait kawasan strategis provinsi yaitu Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu, Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri. Pengembangan sektor pertanian di wilayah Bima dan Dompu menjadi prioritas demi menunjang kesejahteraan di NTB.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat petani di NTB tidak dapat hanya mengandalkan peran tunggal penyuluhan, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung kinerjanya. Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kolaborasi aktor *triple helix* (TH) diharapkan mampu menciptakan konsensus dalam menghadapi berbagai isu terkait penyuluhan pertanian di NTB. Namun, penyelenggaraan penyuluhan pertanian di